MEREFLEKSIKAN KEMBALI KRISTOKRASI BERDASAKAN DIALOG YESUS DENGAN PILATUS DALAM PERIKOP YOH. 18:28-19:16

Innocentius Gerardo Mayolla
STFT Widya Sasana Malang
mayolagerardo@gmail.com

Abstract

This research focuses on exploring and reflecting the Christocratic values of Jesus' royal leadership obtained through theological reflection on the dialogue between Jesus and Pilate in John 18:28 – 19: 16. The dialogue between Jesus and Pilate is part of the story of Jesus' passion and resurrection. This one chapter of Jesus' life is very important to see the religious aspects of Jesus' leadership. Christocracy itself is a system of leadership or government based on Christ as the Head of the Church. The methodology used in this research is a qualitative methodology. This methodology is carried out with interpretive analysis and theological reflection on the text John 18: 28-19: 26. Text interpretation, critical analysis and theological reflection are also supported by an in-depth study of literature related to the topic of Christocracy, the meaning of the Kingdom of Christ and the dialogue between Jesus and Pilate. This research found that based on John 18: 28-19: 16 the character of Christ's kingly leadership or christocracy is centered on Christ himself, comes from divine religious values, aims at witnessing the truth, is willing to suffer for the truth and continues to listen to Jesus as the Lord, The Truth Itself.

Keywords: *Christocracy; dialogue; Jesus Christ; Pilate; Gospel of John*

I. PENDAHULUAN

Relasi demokrasi dan Gereja semakin mencuat pasca Konsili Vatikan II. Gereja Katolik Roma dianggap memiliki peran penting dalam akselerasi demokratisasi banyak negara pada masa gelombang ketiga demokratisasi (Philpott, 2004). Gereja Katolik juga dinilai sebagai promotor nilai universal martabat manusia yang mana juga menjadi keutamaan demokrasi (Troy, 2009). Sedari awal, Gereja menganggap penting nilai martabat manusia yang diimani sebagai citra Allah (*imago Dei*). Inilah yang menjadi dasar antropologi Kristiani bahwa manusia dicipta baik adanya. Implikasi gagasan ini berpengaruh pada pandangan Gereja terhadap demokrasi. Kemudian, nilai-nilai seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, perkembangan ekonomi, demokrasi dan kebebasan

menjadi kata-kata kunci yang mengubah teologi politik Gereja. Gereja tidak lagi melulu berorientasi ke dalam, tetapi juga ke luar. Hal ini memicu pertanyaan: Jika Gereja memperjuangkan demokrasi, bagaimana relasinya dengan Kristokrasi, sebuah model pemerintahan yang dianut Gereja secara institusional?

Khazanah pendalaman mengenai Kristokrasi kerap kali timbul seiring mencuatnya diskursus demokratisasi di dalam Gereja. Ketika demokrasi menjadi tren pola pemerintahan modern, daya pengaruhnya juga menembus tembok-tembok Gereja. Ada beberapa argumentasi menentang demokratisasi di dalam Gereja (Polidano, 2003, hal. 13). Salah satunya ialah slogan terkenal dari Karl Barth, “Gereja bukan (bersistem) demokrasi, tetapi Kristokrasi”. Gereja memfondasikan diri pada “*ius divinum* Kristokrasi” (Barth, 1973, hal. 713). Dengan kata lain, Kristokrasi merujuk pada kepemimpinan dan Ketuhanan Kristus dalam Gereja.

Tidak banyak literatur berupa artikel ilmiah yang membahas mengenai Kristokrasi, khususnya dalam kaitannya dengan iman Katolik. Dua bahasan Pustaka Bahasa Indonesia mengenai Kristokrasi ditulis oleh Sunarko (2005) dan Jegalus (2021). Sunarko membahas Kristokrasi dalam perbandingannya dengan sistem demokrasi pada konteks kepemimpinan hirarkis Gereja Katolik. Kurang lebih serupa, Jegalus membahas Kristokrasi dalam kaitan antara Gereja Katolik dan kekuasaan. Keduanya menyimpulkan bahwa demokrasi tidak dapat diimplementasikan dalam sistem kepemimpinan gerejawi. Alasan mendasarnya ialah karena demokrasi meletakkan kedaulatan tertinggi pada rakyat (Yun: *demos*), sedangkan kedaulatan tertinggi Gereja bersifat ilahiah, yakni Tuhan sendiri. Tak hanya itu, Gereja sendiri dipimpin dengan suatu kepemimpinan dan kehadiran yang sakramental. Gereja adalah tanda dan sarana keselamatan umat manusia. Prinsip inilah yang tak dimiliki oleh demokrasi sebagai salah satu sistem pemerintahan.

Penelitian mengenai kristokrasi ini dilakukan berdasarkan dialog antara Yesus dan Pilatus dalam Yoh 18: 28-19: 26. Dalam khazanah riset sepuluh tahun terakhir terdapat sejumlah penelitian terkait dengan ulasan biblis teks Yoh 18:28-19. Christopher berargumentasi bahwa penginjil menggunakan Pilatus sebagai medium naratif untuk menjelaskan status rajawi Yesus (2022). Sumaryanto membahas teks dengan fokus pada pemberian kesaksian mengenai kebenaran (2021). Young membahas tentang dramatisasi penginjil pada pengenalan Yesus sebagai Sang Raja Sejati (2018). Sementara itu, Brown membahas makna kebenaran dari dialog antara Yesus dan Pilatus yang semakin memuncak (S. Brown, 2015).

Menyimak riset-riset terdahulu, penelitian ini hendak mengusung kebaruan pendasaran atas konsep Kristokrasi yang digali berdasarkan dialog tentang “kerajaan” antara Yesus dan Pilatus dalam teks 18: 28-19: 26. Penelitian ini

bertujuan untuk menjawab *status quaestionis* ini, yaitu: Bagaimana refleksi teologis makna Kerajaan Kristus dalam dialog tersebut? Bagaimana komparasi makna “kerajaan” antara yang dimaksud Yesus dan yang dimengerti Pilatus? Bagaimana tafsir teks Yoh 18: 28-19: 26 memberi makna pada konsep Kristokrasi?

Untuk menjawab *status quaestionis* di atas, maka metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif. Metodologi ini dilaksanakan dengan analisis tafsir dan refleksi teologis atas teks Yoh 18: 28-19: 26. Menafsir sendiri berarti menjelaskan isi teks sehingga pesan teks dapat tersingkap dan dapat dimengerti, sementara refleksi teologis merupakan elaborasi kebenaran iman dan mengeksplanasi hasilnya dalam konteks yang lebih luas (Pareira, 2019). Tafsir teks, analisis kritis dan refleksi teologis ditopang pula dengan pendalaman atas pustaka-pustaka terkait topik Kristokrasi, makna Kerajaan Kristus dan dialog antara Yesus dengan Pilatus.

II. PEMBAHASAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1. Struktur dan Eksegese Yoh 18: 28 – 19: 16

Setelah diinterogasi oleh Hanas dan dibawa pada Imam Besar Kayafas, Yesus digiring ke istana gubernur. Gubernur atau wali negeri yang dimaksud ialah Pontius Pilatus. Ciri pengadilan berubah, dari yang bercorak religius ke corak pengadilan sipil-politis. Kisah diberi rincian waktu “dini hari”. Mereka yang menggiring Yesus tidak mau menginjakkan kaki ke istana itu. Sebab orang-orang Yahudi meyakini bahwa sebelum makan Paskah, mereka tidak boleh masuk ke kediaman orang asing. Rupanya, masuk rumah orang kafir menajiskan seorang Yahudi (bdk. Kis 10: 28).

Setidaknya tiga alasan mengapa Pilatus awalnya tampak tidak berminat mengadili Yesus (Riyadi, 2011, pp. 402-403). *Pertama*, barangkali belum ada keputusan final dari para pemuka agama Yahudi atas nasib Yesus. *Kedua*, Pilatus mengejek secara ironis para Sanhendrin yang tidak mempunyai legitimasi untuk menghukum mati seseorang. *Ketiga*, Pilatus tidak melihat delik perkara Yesus yang dapat dihukum oleh hukum Romawi. Orang-orang Yahudi itu menjumpai Pilatus guna mendapatkan legitimasi untuk menghukum mati Yesus. Belum jelas mengapa mereka membutuhkan legitimasi Pilatus. Ada beberapa kemungkinan: *Pertama*, hak Sanhendrin untuk memvonis mati seseorang telah dicabut penguasa Romawi; *Kedua*, para Sanhendrin dan orang-orang Yahudi tidak mau menajiskan diri saat merayakan Paskah; *Ketiga*, mereka menggunakan kesempatan ini untuk menggoyang otoritas Romawi di Yerusalem.

Hukuman mati di sisi lain juga merupakan hak dan bagian otoritas hukum Romawi. Yesus dibawa sebagai seorang kriminal berat. Pilatus secara tersirat

disindir karena kurang bijaksana, sebab seharusnya langsung saja percaya pada tuduhan pemuka agama Yahudi tanpa harus lebih dulu bertanya (Groenen, 1994, p. 104). Mereka mengatakan, “Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang.” Penginjil membubuhkan keterangan bahwa tergenapilah nubuat Yesus akan cara kematiannya. Seperti sebelumnya Yesus telah mengatakan, “Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan” (3:14). Pilatus lalu membawa Yesus masuk dan menginterogasinya. Mulanya Pilatus mengonfirmasi informasi yang telah didengar sebelumnya. Karena itu Pilatus hendak memastikan apakah Yesus adalah raja. Sebab, setiap perayaan Paskah, sejumlah orang kerap mengaku Mesias, raja yang akan datang dan menyelamatkan bangsa Israel dari kolonisasi bangsa asing. Yesus menegaskan bahwa kerajaan-Nya bukan kerajaan duniawi. Secara negatif atau tidak langsung, Yesus menjelaskan karakter kerajaan yang Ia kehendaki (Groenen, 1994, p. 107).

Yesus tidak menjawab langsung “Ya” bahwa dirinya adalah raja, tetapi menggunakan perkataan Pilatus sendiri. Kendati begitu, Yesus memastikan bahwa menjadi raja adalah tujuan Yesus lahir ke dunia supaya dapat memberi kesaksian tentang kebenaran. Kebenaran adalah kategori dan ciri kerajaan-Nya. Eksistensi Yesus di dunia adalah untuk mewujudkan kerajaan kebenaran itu. Adegan kemudian ditutup dengan pertanyaan Pilatus: *Quid veritas est?* Apakah kebenaran itu? Di sini tampak bahwa dialog mereka tidak lagi nyambung. Mereka berbicara mengenai kebenaran pada taraf yang berbeda. Hal ini menunjukkan gaya ironi penulisan Yohanes (Ehrman, 1983). Selain ironi, *misunderstanding* atau ketidaktahuan memang adalah salah satu ciri naratif Penginjil Yohanes (Gunawan, 2019, hal. 18).

Pertanyaan Pilatus kerap dianggap sekadar pertanyaan retorik. Namun, St. Thomas Aquinas memberikan gambaran yang agak lebih positif. Aquinas menilai Pilatus ingin mengetahui kebenaran bukan tentang definisi formalnya, tetapi bagaimana dirinya dapat menjadi anggota kerajaan yang dimaksud Yesus. Sebab Pilatus menyadari kebenaran tidak dikenal oleh dunia dan tidak dipercayai. “Kebenaran telah jatuh di lapangan-lapangan, dan kejujuran tidak dapat masuk” (Yes 59:14). “Kebenaran telah membusuk di antara anak-anak manusia” (Mzm 11:1). Sayang, Pilatus tidak menunggu jawaban Kristus (Aquinas, 2010, hal. 224). Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Pilatus sangat berhati-hati, karena itu dirinya membuat tawaran pada orang-orang Yahudi. Seturut kebiasaan, *privilegium paschale*, ada pembebasan seorang tahanan Romawi. Dengan menyebut gelar “Raja orang Yahudi” pada Yesus, Pilatus hendak menekankan ketiadaan Raja Yahudi (bdk. Herodes, dst.), selama mereka menerima Kaisar sebagai pimpinan tertinggi. Pilatus hendak membebaskan Yesus. Akan tetapi orang-orang Yahudi justru menolak Yesus dan menyerukan agar Yesus yang lain

dibebaskan: Barabas. Barabas adalah seorang pemberontak dan tahanan politis Roma. Penginjil Yohanes menyebutnya sebagai penyamun (Yoh 18: 40).

Kemudian Pilatus menyuruh para prajurit untuk mencambuk Yesus. Mereka memberi hukuman fisik dengan mencambuk, memukul dan menampar. Para algojo itu mengolok-olok diri Yesus sebagai “Raja”. Mereka menganyam mahkota duri. Jubah ungu sebagai lambang raja dikenakan pada Yesus. Olok verbal juga diberikan. “Salam, hai Raja orang Yahudi!” (Yoh 19:3). Setelah itu, Pilatus membawanya keluar dan mempertontonkan Yesus yang bermahkota duri dan berjubah ungu itu pada khalayak. Harapan Pilatus ialah agar Yesus yang tampak menderita itu mendapat simpati rakyat (R. E. Brown, 1988, hal. 92). “*Ecce homo!*” Reaksi orang-orang itu mengejutkan Pilatus. Mereka berteriak agar Yesus disalibkan. Ketakutan Pilatus memuncak ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus harus mati karena mengganggu diri-Nya Putra Allah (19:7). Pilatus yang memahami hal ini sebagai konflik politis terseret pada perkara religius.

Pilatus membutuhkan alasan rasional untuk mengalahkan ketakutannya dan rasa penasaran akan pribadi Yesus. Pertanyaan “Dari mana asal-Mu?” tidak dijawab Yesus. Karena itu dengan agak mengancam Pilatus menggunakan otoritasnya. Pilatus membawa persoalan kembali pada tataran yuridis-politis. Kendati demikian, Yesus bergeming. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada kekuasaan yang bisa mengatasi diri-Nya selain kekuasaan ‘dari atas’. Lagi, Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dan berusaha membebaskan Yesus. Namun, khalayak balik mengultimatum Pilatus dengan menyebut kaisar, “Jikalau engkau membebaskan orang ini (Yesus), engkau bukanlah sahabat Kaisar” (19:12) dan “Kami tidak mempunyai raja selain kaisar” (19:15c). Adegan kemudian ditutup dengan penyerahan Yesus oleh Pilatus pada mereka untuk disalibkan.

Banyak ahli sepakat dan menyebut bahwa dialog antara Yesus dan Pilatus berada dalam skema tujuh adegan. Ketujuh adegan itu diklasifikasikan berdasarkan keberkaitan semantik, yakni posisi gerak Pilatus, apakah dirinya berada di dalam atau di luar Praetorium. Penulis menyetujui argumentasi Young yang berpendapat bahwa Yohanes tidak menuliskan ini sebagai kegamangan hati Pilatus, tetapi untuk memberi efek dramatis pada kedatangan Yesus sebagai Raja (Young, 2018). Hal ini diungkap dengan sejumlah frasa, “Pilatus masuk kembali...” (ay. 33); “Pilatus keluar lagi...” (ay. 38b), dan seterusnya. Adegan-adegan itu antara lain: a) 18: 28-32, Pilatus disertai Yesus oleh para pemuka agama Yahudi (di luar), b) 18: 33-38a, Pilatus berdialog dengan Yesus tentang kerajaan-Nya (di dalam), c) 18:38b-40, Pilatus menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah (di luar), d) 19: 1-3, Pilatus menyuruh algojo-algojo Romawi mencambuk Yesus (di dalam), e) 19:4-8, Pilatus menyatakan kembali, Yesus tidak bersalah (di luar), f) 19:9-12, Pilatus berdialog dengan Yesus tentang asal-

usul-Nya, lalu adegan ditutup dengan g) 19: 13-16, Pilatus menyerahkan Yesus kembali kepada para pemuka agama Yahudi untuk disalibkan (di luar) (Senior, 1991, pp. 68–69).

Dalam ketujuh adegan itu, tampak kerapian dan keindahan Yohanes dalam menarasikan drama ketika Yesus bersama dengan Pilatus. Pilatus seolah digambarkan sebagai yang dominan dan berkuasa, sementara Yesus tampil tak berdaya. Pilatus menjadi protagonis cerita. Hal ini tampak dari pembabakan kisah tersebut. Sejak penyerahan Yesus oleh para pemuka agama Yahudi, Pilatus mengambil peran sentral. Dalam struktur pengadeganan di atas Yohanes menuliskannya dalam struktur kiastik konsentris. Bagian sentral dari kisah adalah adegan Pilatus menyuruh para algojo Romawi untuk mencambuk Yesus.

Struktur di atas menggambarkan Yesus yang tak melawan, pasif dan tak berdaya. Yesus menjadi objek kekuasaan Pilatus. Namun jika ditelisik kembali, pusat struktur konsentris itu merupakan adegan pemahkotaan duri Yesus. Pusatnya adalah koronasi Yesus. Walaupun terjadi dalam suasana penghinaan, Yesus ditampilkan sebagai raja. Hal ini sesuai dengan tema besar teologi Penginjil Yohanes yang hendak menegaskan sisi regalitas (kerajawian) dari Yesus (Harun, 2015). Maka dari itu, struktur di atas dapat disusun kembali dengan menjadikan Yesus sebagai pusat dan protagonis adegan. Struktur konsentris itu menjadi demikian: a) 18: 28-32, Yesus diserahkan kepada Pilatus dan menerima tuduhan orang-orang Yahudi b) 18: 33-38a, Yesus menjelaskan asal kerajaan-Nya pada Pilatus, c) 18:38b-40, Yesus dinyatakan tidak bersalah d) 19: 1-3, Yesus dimahkotai duri, e) 19:4-8, Yesus kembali dinyatakan tidak bersalah, f) 19:9-12, Yesus menjelaskan asal-usul kekuasaan-Nya, g) 19: 13-16, Yesus diserahkan Pilatus kepada orang-orang Yahudi untuk disalibkan.

2.1.2. Refleksi Teologis: Teologi Politik dan Kebenaran

Dialog Yesus dan Pilatus merupakan bagian besar dari rangkaian kisah sengsara Yesus yang dituliskan oleh penginjil Yohanes. Dari karangan Yohanes ini, seluruh dialog privat antara Yesus dan Pilatus ini terjadi di dalam gedung *Praetorium*. Fakta ini seolah menunjukkan sisi personal dan intim konversasi itu. Tak hanya personal, dialog Yesus dan Pilatus menampilkan strategi dan keunggulan Yesus dalam berkomunikasi tanpa kekerasan (*non violent communication*) di mana terdapat unsur kesadaran, bahasa dan komunikasi yang otentik (Kowalski, 2022). Bila dihitung, terdapat dua adegan khusus dialog Yesus dan Pilatus. Dialog pertama terjadi pada adegan (b), sementara dialog kedua terjadi pada adegan (f). Dari pertanyaan-pertanyaan Pilatus, tidak semua dijawab secara langsung oleh Yesus. Kadang Yesus hanya diam. Pada kesempatan lain, Yesus menjawab secara negatif (tidak langsung mengafirmasi). Yang menarik ialah topik dialog itu ialah tentang kerajaan dan kekuasaan.

Sepintas, percakapan antara Yesus dan Pilatus ini tampak tidak mengalir. Di satu sisi karena Yesus menjawab secara negatif atau justru diam, dan di lain pihak ialah soal taraf pembicaraan itu. Yesus berbicara makna kerajaan rohani. “Kerajaan-Ku bukan dari dunia ini” (18: 36), tetapi Pilatus memahaminya sebagai kerajaan sipil-sekular-politis. Beberapa kali Pilatus menyebut Yesus sebagai “Raja orang Yahudi” (bdk. 18: 33b, 39), atau “Rajamu” (bdk. 19: 14-15). Gambaran komparatif karakter kerajaan antara Yesus dan Pilatus disistematisasikan melalui tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Sistematisasi Komparatif Karakter Kerajaan Antara Yesus dan Pilatus

UNSUR KERAJAAN	PILATUS	YESUS
Pimpinan	Kaisar Roma, yang membawahi Gubernur Roma di Yudea yaitu Pilatus	Yesus, Raja Semesta Alam (Allah Sendiri) (Yoh 18:37)
Asal-Usul Kekuasaan	Dari bawah, dunia, sementara	Dari Atas, Allah (Yoh 19:11), tetap-abadi
Sifat	Duniawi, Sekuler	Rohani, Religius
Basis Kebijakan/Keputusan	Kepentingan	Kebenaran
Tujuan	Mempertahankan otoritas dan kekuasaan, ditandai dengan takut kehilangan kekuasaan	Bersaksi tentang Kebenaran (Yoh 18:37),
Ciri Kepemimpinan	Ragu, dilematis, kesulitan mengambil keputusan, populis (bergantung pada suara terbanyak)	Berprinsip pada kebenaran ilahi (Yoh 18:37; 19: 11), tegar, rela menderita (Yoh 19:1-3)
Pengikut/Massa	Mayoritas	Setiap orang yang berasal dari kebenaran dan mendengarkan Suara-Nya (Yoh 18:37)

Sumber: Data diolah (2023)

Pimpinan dari Pilatus adalah Kaisar Roma sendiri. Keputusan yang diambil sangat mungkin akan berdampak pada posisi jabatan yang diemban saat ini. Kekuasaan Pilatus itu berasal dari dunia dan dengan demikian bersifat sementara. Pilatus dapat didepak kapanpun. Sifat kekuasaannya pun duniawi dan sekuler. Pilatus seringkali salah mengerti kekuasaan Yesus yang berciri ilahi, bukan politis. Tujuan kekuasaan Pilatus ialah kemapanan jabatannya. Dirinya ingin otoritas kekuasaannya tetap bertahan. Pilatus tampak bergantung pada suara khalayak. Teriakan-teriakan orang-orang Yahudi memengaruhi kapasitasnya untuk mengambil keputusan. Berkali-kali dirinya tampak gamang. Dua kali Pilatus bertanya dan memberikan tawaran pada khalayak Yahudi. *Pertama*, Pilatus menawarkan pembebasan bagi Yesus. “Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?” (Yoh 18:39). *Kedua*, Pilatus bertanya,

“Haruskah aku menyalibkan rajamu?” (Yoh 19: 15). Dua kali pula Pilatus berusaha menunjukkan Yesus yang tampak menderita kepada orang-orang yang berkumpul di situ. “Lihatlah manusia itu!” (18: 5) dan “Lihatlah rajamu!” (19:14). Namun, pada akhirnya, *vox populi, vox Pontii*, suara rakyat menjadi suara Pilatus. Pilatus menyerahkan Yesus kembali kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan.

Kontras dari kepemimpinan Pilatus, sifat kerajaan Yesus berciri corak religius. Kerajaan-Nya adalah kerajaan Ilahi, yang kekal “tidak akan berkesudahan” (Luk 1:32). Kerajaan Yesus berasal dari atas, sehingga keputusan, sifat dan tujuannya tidak bergerak atas dasar kepentingan politis atau yuridis sesaat. Basis pengambilan keputusan dan kebijakan kerajaan Yesus adalah kebenaran. Sebab Yesus sendirilah, “Jalan, Kebenaran dan Hidup” (Yoh 14:6). Eksistensi Yesus di dunia bertujuan untuk bersaksi tentang kebenaran. Kehadiran hidup Yesus memiliki tugas pokok untukewartakan kebenaran Kerajaan Allah. Yesus “harus memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Yesus diutus” (bdk. Luk 4:43). Keputusan Pilatus bergantung pada suara mayoritas, tetapi Yesus menegaskan bahwa pengikut-Nya adalah mereka yang “berasal dari kebenaran”. Karena mereka yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Nya.

Dialog antara Yesus dan Pilatus ini membawa suatu penegasan paradigmatik teologi politik. Politik Pilatus ialah politik mempertahankan kekuasaan, sedangkan politik Yesus itu teologis. Teologi politik Yesus justru hendak meredusir kecenderungan politik sebagai ideologi sebagaimana yang dipromosikan oleh karakter Pilatus. Tak hanya tentang teologi rajawi atau politik, dialog Pilatus dan Yesus membawa suatu tawaran akan teologi kebenaran. “Kebenaran” adalah salah satu kata kunci Injil Yohanes. Pertanyaan Pilatus “Apa itu kebenaran?” bukan sekadar pertanyaan retorik tetapi pertanyaan reflektif yang diajukan pada sidang pembaca. Maka dari itu perlu penegasan akan makna semantik kebenaran dalam Injil Yohanes. Untuk memahami makna kata ‘kebenaran’, siapapun perlu untuk mengerti bahasa asli teks. Injil Yohanes ditulis dalam bahasa Yunani. “Kebenaran” dalam teks ini ditulis dengan kata *aletheia*. Secara harafiah *aletheia* ini berarti penyingkapan rahasia. Dalam konteks dekat, kebenaran rahasia yang diungkap Yesus adalah identitas-Nya. Bahwa Yesus dan Bapa adalah satu (Harun, 2015, hal. 217). Barangsiapa melihat Yesus, telah melihat Bapa. Hal ini tidak saja dimengerti sebagai realita empiris, tetapi juga spiritual.

Aletheia dalam Bahasa Yunani juga memiliki makna ganda yakni berarti benar yang dilawankan dengan kepalsuan, dan juga nyata yang dilawankan dengan tiruan atau kebohongan (Darmawijaya, 1987). Yesus hendak menyatakan bahwa diri-Nya sungguh-sungguh, *real, tenanan*, dan kepenuhan kebenaran itu sendiri. Kebenaran dalam teks ini berarti juga menunjukkan identitas Yesus. Yesus mengidentifikasi diri dengan ‘Kebenaran’ itu sendiri. ‘Kebenaran’ tidak

lagi sebagai sekadar tinggal dalam kategori epistemologis, atau sejauh kapasitas intelektual untuk mengetahui dan memahami. Yesus menunjukkan makna kebenaran dalam personalitas-Nya sebagai Allah dan Manusia. Kebenaran ini mempribadi. Kebenaran penuh ada dalam pribadi Yesus. Yesuslah Sang Kebenaran itu. Dalam rangka kesaksian akan kebenaran ini pula, motif inkarnasi Yesus paripurna. “Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini, supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran” (Yoh 18:37).

Kata “kebenaran” juga tidak dapat terpisah dari pernyataan Yesus adalah ‘Jalan’. Sebagai ‘jalan’, Yesus bukan sekadar menampilkan diri sebagai pembimbing dan pemimpin, tetapi sungguh-sungguh ‘jalan’, cara, metode, menuju keselamatan. Hal ini saling berkorelasi dengan makna kebenaran dalam Yohanes 1 yang memaknai kebenaran sebagai status keselamatan (Fay, 2022). Kebenaran inilah yang ditegaskan kembali oleh-Nya. Jalan keselamatan hanya melalui diri-Nya adalah suatu kebenaran hakiki iman. Dengan menyatakan dirinya sebagai kebenaran, Yesus tidak memberikan definisi ontologis dalam pengertian transendental tetapi menggambarkan dirinya dalam pengertian misinya kepada manusia (R. E. Brown, 1970). Dalam konteks jauh, kata “kebenaran” juga muncul berulang kali dalam Injil Yohanes.

Kebenaran menjadi topik yang cukup dominan selain kasih dan kehidupan. Terjemahan LAI menampilkan 28 kali kata “kebenaran” dalam Injil keempat itu. Secara semantik kata ‘Kebenaran’ dapat dimengerti sebagai: hadir secara penuh dalam diri Yesus (1:14), datang dari Yesus (1:17), sebagai *lex orandi* orang beriman (Yoh 1:23, 24), kesaksian Yohanes (5:32), perkataan Yesus (8:32, 45, 46) yang didengar dari Allah (8:40), tanpanya adalah Iblis (8:44), Roh (14:17, 16:13), keluar dari Bapa (15:26), realitas penghakiman, dosa, dan kepergian Yesus (16:1-10), firman Bapa (17:17), bahan kesaksian (18:37), dan wafat Yesus (19:35). Dapat disimpulkan kebenaran dalam Injil Yohanes merujuk pada pribadi Yesus sendiri. Kebenaran paripurna ada dalam diri Yesus. Yesuslah Sang Kebenaran itu. Yesus mewujudkan harapan akan kemenangan kebenaran yang hakiki (Köstenberger, 2005). Barangsiapa yang berasal dari-Nya akan senantiasa mendengarkan suara-Nya.

2.1.3. Memaknai Kembali Kristokrasi

Secara etimologis Kristokrasi merupakan paduan dua kata Yunani *Christos* (*Χριστός*) yang berarti ‘yang terurapi’ (merujuk pada Yesus Kristus) dan *kratein* (*κράτος*) yang berarti ‘kekuasaan’ atau ‘aturan’. Berdasarkan Kamus Inggris Oxford, kristokrasi pertama kali dicetuskan oleh Richard Eedes seorang klerik Inggris abad ke-17 (Oxford English Dictionary, 2023). Nobertus Jegalus berpendapat bahwa term kristokrasi dikemukakan oleh Joseph Kardinal Ratzinger (2021, p. 293). Tentang yang terakhir ini belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Singkat kata, kristokrasi yang dimaksud ialah sistem pemerintahan dan kepemimpinan Gerejawi yang berdasarkan pada kepemimpinan Kristus sebagai kepala.

Bahasan mengenai kristokrasi banyak muncul ketika dalam masyarakat dan umat Katolik pada khususnya mulai bertanya tentang peluang demokratisasi dalam Gereja. Satu tulisan muncul dari Sunarko dengan mempertanyakan dan kemudian memperjelas posisi katolik, *Gereja: Demokrasi atau Kristokrasi?* (2005, pp. 43–56). Sunarko menjawab bahwa jika demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan formal yang memiliki basis legitimasi rakyat, maka Gereja tidak dapat disebut menggunakan sistem demokrasi. Tetapi jika demokrasi dilihat sebagai etos yang mempertahankan semangat dialog, diskusi, pembelaan hak dan martabat, dan partisipasi, maka semangat itu sesuai dengan spirit sinodalitas Gereja. Paus Fransiskus sendiri sejak tahun 2022 telah mencanangkan semangat sinodalitas yang menekankan ciri misi, partisipasi dan komunio. Bila demokrasi dipahami dalam konteks demikian, maka persoalan tidaklah menjadi besar. Kendati demikian, titik tolak penting dan utama yang tak boleh dilupakan adalah pemberian tempat yang begitu besar pada gerak Roh Kudus. Dimensi pneumatologis Gereja tidaklah dapat dikesampingkan oleh karena semangat demokratisasi di segala aspek.

Dengan nada tulisan yang kurang lebih sama, Jegalus berpendapat bahwa nilai yang dipegang oleh Gereja adalah kristokrasi dan bukan demokrasi absolut (2021, p. 316). Gereja bukan konstruksi sosial manusia sehingga analisis sosiologis dan organisatoris melulu tidak dapat diterapkan begitu saja pada hirarki dan kekuasaan Gerejawi. Kendati begitu nilai-nilai demokrasi tidak begitu saja dihilangkan. Dalam sejarah nilai-nilai Kristiani telah membentuk sedemikian kultur demokrasi yang dinikmati saat ini. Mazurkiewicz (2009) menulis demikian:

“Hanya dengan Kekristenan, dengan ajaran-ajarannya tentang konsep hak-hak pribadi yang tidak dapat diganggu gugat, kesetaraan, hak-hak politik rakyat, dan nilai absolut hubungan berdasarkan hukum dan keadilan sebagai dasar masyarakat dan berdasarkan kasih persaudaraan, terciptalah Visi baru tentang tatanan politik yang ingin diimplementasikan oleh semua negara kontemporer. Jika bukan karena konsep demokrasi Kristen, demokrasi yang kita kenal saat ini, mungkin akan mengambil bentuk yang berbeda. Dukungan Gereja terhadap demokrasi adalah sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, tidak setiap jenis demokrasi secara otomatis sesuai dengan ajaran Gereja. Hal ini bergantung pada hubungan demokrasi dengan kebenaran dan kebebasan. Gereja mendukung demokrasi saat ini, namun tidak mendukung satu visi konkret tentang sistem politik Negara. Gereja menghormati otonomi yang adil dari tatanan demokrasi, dan tidak memiliki alasan konkret untuk mendukung satu solusi kelembagaan dan konstitusional tertentu atau yang lainnya”.

Nilai-nilai demokrasi dapat dihayati dalam Gereja yang bercorak kristokrasi. Semangat demokrasi yang *compatible* dengan Gereja patut dipertimbangkan yakni semangat mendengarkan, secara khusus pada umat awam dan mereka yang terpinggirkan. Sebab, demokrasi memiliki nilai-nilai yang koheren dengan visi Gereja sejauh demokrasi menganut nilai kebenaran seturut hati nurani manusia. Mengutip Kardinal Ratzinger, Mazurkiewicz mengatakan bahwa “Demokrasi hanya dapat berfungsi dengan baik jika hati nurani, yang juga harus patuh dan mengarahkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai dasar Kristen yang fundamental, nilai-nilai yang juga dapat diterapkan bahkan dalam konteks agama non-Kristen.” (Mazurkiewicz, 2009, hal. 181). Dengan demikian demokrasi yang diinginkan memiliki basis kuat pada kebenaran bukan demokrasi yang berdasarkan relativisme.

Lalu, dalam diskursus ini bagaimana kembali memaknai kristokrasi dalam kehidupan menggereja? Kristokrasi kiranya dipahami sebagai sistem kepemimpinan Gerejawi yang berpusat pada Kristus sebagai Kepala Gereja. Kristus adalah Tuhan dan *role model* tertinggi. Ciri kristokrasi selain yang umum digambarkan Injil: Yesus sebagai pelayan, cinta kasih, pewarta kebenaran, atau nabi juga diperkaya dengan makna teologis kepemimpinan Kristus dari dialog Pilatus dan Yesus. Bahwa Kristokrasi yang dimaksud adalah pemusatan perhatian, hati dan basis keputusan pada diri Yesus Sang Kebenaran Sejati. Inilah poin penting yang mesti diperhatikan dalam kepemimpinan Kristiani yang kristokratik. Kepemimpinan yang Kristokratik berarti berpusat pada Yesus Sang “Jalan, Kebenaran dan Hidup” (bdk. Yoh 14:6).

Mengimani Yesus sebagai pemimpin berimplikasi pada banyak hal: *Pertama*, corak kepemimpinan kristokratik itu bersifat rohani, religius, dan metafisik. Ia tak mengejar perbendaharaan materi duniawi. Ia menggunakan materi sebagai sarana sejauh mendukung kebutuhan spiritual. Kerajaan Yesus juga menekankan kerajaan Allah yang berdiam di hati, yang mana ditandai dengan buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri (bdk. Gal 5: 22-23). Kepemimpinan spiritual ini menitikberatkan diri pada relasi dengan Kristus sendiri. Kristokrasi mensyaratkan hidup yang kristosentris, berpusat pada Kristus. Kepemimpinan kristokratik ini juga mengekspresikan pengakuan pada Kristus, Sang Kepala Tubuh Gereja. Scheuer (1942) menulis dengan indah:

“Ada kesatuan yang lebih tinggi, kesadaran sosial, solidaritas manusia yang didasarkan pada Kristus mistik. Hal itu menemukan ekspresi sejatinya dalam konsepsi korporat masyarakat di mana Kristus adalah Kepala! Terikat kepada-Nya adalah pribadi-pribadi, sel-sel Tubuh Mistik-Nya; mereka secara sukarela mengelompokkan diri mereka dalam hierarki, organ-organ untuk keuntungan mereka sendiri dan untuk keuntungan satu sama lain. Masing-masing bekerja untuk yang lain. Semua bekerja untuk Kristus! Masyarakat menjadi

Kristosentris, sebuah Kristokrasi”.

Kedua, dalam hidup Gereja, Kristokrasi itu terwujud pada hirarki yang diinstitusikan oleh Yesus sendiri. “Dan Akupun berkata kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga” (Mat 16: 18). Yesuslah yang menetapkan penerusan tongkat kegemalaan pada para rasul dan kemudian dilanjutkan oleh para uskup. (LG 2012b, para. 20). Seluruh umat diminta untuk bersikap tunduk, taat dan setia pada hirarki. Bukan demi kehormatan atau kekuasaan Gerejawati, tetapi pada kehendak Kristus sendiri. Bagaimana dengan peran awam? Awam tetap memiliki peran penting, yang bertugas menguduskan dunia serta merasul seperti martabat baptisan yang diterimanya. *Trimunera Christi*, tiga tugas Kristus, antara lain menjadi: imam, nabi dan raja (AA 2012a, para. 2). Umat Kristiani dipanggil untuk menguduskan dunia dengan kekhasan hidup, aneka profesi dan pelayanan masing-masing. Umat awam diharapkan mampu berkarya dan berpartisipasi secara aktif melebarkan Kerajaan Allah bahkan di tempat yang kerap kali dipandang negatif sekalipun: politik, bisnis, ekonomi, dan seterusnya. Maka, dalam kepemimpinan gerejawati yang diperuntukkan bagi kaum awam, seperti pengurus dewan pastoral, petinggi organisasi Katolik, lingkungan atau basis komunitas Gerejawati, hendaknya tidak mengejar kekuasaan sebagai instrumen politis tetapi pelayanan.

Dengan gaya kepemimpinan ini, kiranya gaya eleksi atau pemilihan pengurus baru tidak mengabsolutkan sistem *voting* atau suara terbanyak. “Kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak”, begitu kalimat mashyur yang kerap diatribusikan pada mendiang Paus Benediktus XVI (Menke, 2024). Hal ini tidak berarti pemungutan suara dilarang dalam Gereja. Gereja Katolik sendiri menggunakan suara terbanyak untuk memilih Paus baru (konklaf). Suara terbanyak sebagai metode adalah sah, tetapi setiap orang dituntut untuk pertamanya mendengarkan kebenaran sebagai inspirasi dari Roh Kudus sendiri. *Ketiga*, kepemimpinan Kristokratik berarti menjadikan Gereja sebagai pelayan. Yesus telah menunjukkan dan meneladankan sikap pelayan (Yoh 13: 14). Maka ini pulalah yang menjadi ciri khas kepemimpinan Kristiani. Kekuasaan bukan dijadikan tujuan akhir nan absolut melainkan sarana efektif untuk menyebarkan warta kebenaran Kerajaan Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Kristus sendiri. Kekuasaan berarti perwujudan pelayanan kasih pada area yang lebih tinggi dan luas.

2.2 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, di mana pendekatan yang digunakan adalah untuk memahami makna yang terkandung dalam teks

Yohanes 18:28-19:26. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna teologis dengan cara mendalam dan kontekstual. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena berdasarkan perspektif subjektif, interpretatif, dan holistik. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan memahami pengalaman manusia dalam konteks tertentu, dengan menekankan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial dan budaya. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah peristiwa penyaliban Yesus sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes.

III. PENUTUP

Dialog antara Yesus dan Pilatus ini membawa suatu tawaran pendekatan paradigmatik baru dalam melihat kepemimpinan Kristiani, yakni Kristokrasi. Bagaimana cirinya? Berdasarkan Yoh 18: 28-19: 16 ditemukan bahwa karakter kepemimpinan rajawi Kristus itu berpusat pada Kristus sendiri, bersumber dari nilai-nilai religius ilahi, bertujuan pada kesaksian akan kebenaran, rela untuk menderita karena kebenaran dan terus mendengarkan Yesus sebagai Sang Kebenaran sejati. Kristokrasi merupakan sistem kepemimpinan berdasarkan Kristus sebagai Kepala Gereja. Pasca ditelusuri lebih jauh, kristokrasi tidak melulu soal sistem gubernasi melainkan lebih kepada suatu spiritualitas kepemimpinan Gerejawi. Konsep Kristokrasi ini penting untuk senantiasa diingat dalam diskursus umat beriman, bahwa kepemimpinan Kristiani tidak berpusat pada mayoritas atau suara terbanyak sebagaimana menjadi basis keputusan Pilatus, tetapi pada nilai-nilai kebenaran yang diberikan oleh Kristus, “Jalan, Kebenaran dan Hidup” itu sendiri. Suara terbanyak hanyalah salah satu sarana, bukan tujuan. Kebenaran yang berpusat pada Kristus inilah yang menjadi pusat dan tujuan absolut.

Kontribusi temuan penelitian ini ialah bahwa kristokrasi bukanlah saja tentang sistem penyelenggaraan organisasi melainkan pada semangat, *elan vital*, serta spiritualitas kepemimpinan Gerejawi yang berdasar pada Kristus. Refleksi Kristus sebagai pusat gravitasi dari sistem kepemimpinan itu diperkuat dan diperdalam lewat eksegeze atas dialog Yesus dan Pilatus. Komparasi karakter kepemimpinan mereka membawa pada kesimpulan bahwa kepemimpinan kristokratik adalah kepemimpinan yang berpusat pada Kristus (Kristosentris), mendasarkan pengambilan kebijakan dan keputusan pada nilai-nilai kebenaran Kristiani, memiliki semangat martiria atau rela menderita serta berani bersaksi tentang kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, T. (2010). *Commentary ont the Gospel of John Chapter 13-21* (F. Larcher (penerj.)). The Catholic University of America Press.
- Barth, K. (1973). *Church Dogmatics (4 Vols)*. T&T Clark.
- Brown, R. E. (1970). *The Gospel According to John (XIII-XXI)* (The Anchor). Doubleday.
- Brown, R. E. (1988). *The Gospel and Epistles of John: A Concise Commentary*. The Liturgical Press.
- Brown, S. (2015). What is Truth? Jesus, Pilate, and the Staging of the Dialogue of the Cross in John 18:28-19:16a. *Catholic Biblical Quarterly*, 77(1), 69–87. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=100326728>
- Christopher, D. (2022). The Functional Characterization of Pilate and the Kingship of Jesus in John 18-19. *Jurnal Jaffray*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.25278/jj.v20i1.644>
- Darmawijaya, S. (1987). *Gelar-Gelar Yesus*. Kanisius.
- Ehrman, B. D. (1983). Jesus' Trial Before Pilate: John 18:28—19:16. *Biblical Theology Bulletin: Journal of Bible and Culture*, 13(4), 124–131. <https://doi.org/10.1177/014610798301300406>
- Fay, R. C. (2022). Jesus as Truth: An Exegetical and Theological Reading of John, with Implications for 1 John. *The Covenant Quarterly*, 80(1). <https://covquarterly.com/index.php/CQ/article/view/151/159>
- Gunawan, H. P. (2019). *Pengantar Injil Yohanes*. Widya Sasana Publication.
- Harun, M. (2015). *Yohanes: Injil Cinta Kasih*. Kanisius.
- Jegalus, N. (2021). Gereja dan Kekuasaan: Kristokrasi dalam Gereja. In *Gereja Selaras Zaman: Butir-Butir Pengajaran Konsili Vatikan II bagi Umat* (hal. 293–318). Obor.
- Konsili Vatikan II. (2012a). Apostolicam Actuositatem. In *Dokumen Konsili Vatikan II* (hal. 349–390). Obor.
- Konsili Vatikan II. (2012b). Lumen Gentium. In *Dokumen Konsili Vatikan II* (hal. 69–170). Obor.
- Köstenberger, A. J. (2005). “What is truth?”: Pilate’s question in its Johannine and larger biblical context. *Journal of the Evangelical Theological Society*,

48(1), 33–62. https://etsjets.org/wp-content/uploads/2010/06/files_JETS-PDFs_48_48-1_48-1-pp033-062_JETS.pdf

Kowalski, B. (2022). A Study of Pontius Pilate (John 18:28-19:16a): Power Strategies and the Abuse of Power. *Ghana Journal of Religion and Theology*, 12(1–2), 39–62. <https://doi.org/10.4314/gjrt.v12i1-2.5>

Mazurkiewicz, P. (2009). Democracy and the Church. *Civitas. Studia z Filozofii Polityki*, 11, 161–185. <https://doi.org/10.35757/CIV.2009.11.08>

Menke, K.-H. (2024). *Human dignity is not a matter of majority vote*. The Tagespost Foundation for Catholic Journalism. <https://www.benedictusxvi.com/addresses/benedict-xvis-address-before-the-german-parliament/human-dignity-is-not-a-matter-of-majority-vote-by-professor-karl-heinz-menke>

Pareira, B. A. (2019). Studi dan Riset Alkitabiah. In A. C. Raharso & Yustinus (Ed.), *Metodologi Riset Studi Filsafat Teologi* (hal. 195–239). Dioma.

Philpott, D. (2004). Christianity and Democracy: The Catholic Wave. *Journal of Democracy*, 15(2), 32–46. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0034>

Polidano, D. (2003). *Towards a More Democratised Church*. 55(2004).

Scheuer, J. F. (1942). Christocracy. *The Irish Monthly*, 70(824). Joseph F. Scheuer

Sumaryanto, T. O. (2021). Memberi Kesaksian Tentang Kebenaran Di Tengah Budaya Fear of Missing Out: Refleksi Teologis Yoh 18:28-40. *Jurnal Teologi*, 10(02), 149–178. <https://doi.org/10.24071/jt.v10i2.3979>

Sunarko, A. (2005). Gereja: Demokrasi atau Kristokrasi. In A. A. L. Binawan (Ed.), *Demokratisasi dalam Paroki: Mungkinkah?* (hal. 43–60). Kanisius.

Troy, J. (2009). “Catholic waves” of democratization? Roman Catholicism and its potential for democratization. *Democratization*, 16(6), 1093–1114. <https://doi.org/10.1080/13510340903271753>

Young, N. H. (2018). “The King of the Jews:” Jesus Before Pilate (John 18:28-19:22). *Australian Biblical Review*, 66, 31–42.